

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

I. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH DAN ATAU PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK, BARANG PENTING ATAU BARANG LAINNYA SERTA RESIKO KEDEPAN

Perkembangan Inflasi di Kabupaten Lampung Tengah pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pada Januari 2025 inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Lampung sebesar 1,04 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Metro sebesar 1,54 persen. Pada Januari 2025, terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Lampung sebesar 1,04 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,66. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Metro sebesar 1,54 persen, dengan IHK sebesar 106,13 dan terendah terjadi Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,73 persen dengan IHK sebesar 109,85.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,08 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 2,64 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,27 persen; kelompok kesehatan 2,69 persen; kelompok transportasi 0,50 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 5,32 persen; kelompok pendidikan 5,64 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,59 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,72 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks (deflasi), yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga 11,45 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,71 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Januari 2025 tercatat deflasi sebesar 0,71 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Januari 2024 mengalami deflasi sebesar 0,71 persen.

b. Pada Februari 2025 terjadi inflasi Year on Year (y-on-y) Provinsi Lampung mengalami deflasi sebesar 0,02 persen. Deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,38 persen.

- Pada Februari 2025, terjadi deflasi year on year (y-on-y) Provinsi Lampung sebesar 0,02 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,95. Deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,38 persen dengan IHK sebesar 108,91, dan Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mesuji sebesar 0,57 persen, dengan IHK sebesar 110,13.
- Deflasi y-on-y terjadi karena adanya penurunan harga pada 2 kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 15,72 persen dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,73 persen. Sementara 9 kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 2,31 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 2,35 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,64 persen; kelompok kesehatan 2,56 persen; kelompok transportasi 0,79 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 4,62 persen; kelompok pendidikan 5,64 persen; kelompok penyediaan

makanan dan minuman/restoran 1,58 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,45 persen.

- Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Februari 2024 tercatat deflasi sebesar 0,66 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Februari 2025 juga mengalami deflasi sebesar 1,36 persen.

c. Pada Maret 2025, terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Lampung sebesar 1,58 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,05. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Mesuji sebesar 2,54 persen, dengan IHK sebesar 113,13 dan terendah terjadi Kota Metro sebesar 1,40 persen dengan IHK sebesar 107,26.

y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,76 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 1,07 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,24 persen; kelompok kesehatan 1,36 persen; kelompok transportasi 0,73 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 3,83 persen; kelompok pendidikan 5,64 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,40 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,97 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 5,84 persen; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,68 persen.

y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks (inflasi) kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,76 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 1,07 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,24 persen; kelompok kesehatan 1,36 persen; kelompok transportasi 0,73 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 3,83 persen; kelompok pendidikan 5,64 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 1,40 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,97 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 5,84 persen; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,68 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Lampung Tengah pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan, khususnya komoditi utama penyumbang inflasi dan stabilisasi harga cuaca yang menyebabkan gangguan produksi pertanian (beras dan aneka cabai) dan perikanan.
- b. Meningkatnya harga bawang putih, daging ayam ras, telur serta beras seiring dengan meningkatnya permintaan akibat masuknya HBKN Idul Fitri 2025.
- c. Mendorong perdagangan antar daerah melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD), dalam rangka menjaga pasokan komoditas pangan daerah.
- d. Mensosialisasikan secara masif capaian positif Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengendalian inflasi sehingga masyarakat dapat memahami dan meningkatkan kepercayaan terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, serta tidak terjadi rush panic buying (pembelian barang yang tidak terkendali).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

III. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Kebijakan pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan Kabupaten Lampung Tengah pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan operasi pasar, pasar murah, dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan SPHP, pemantauan realisasi penyaluran bantuan pangan yang dibutuhkan masyarakat.
2. Melaksanakan rapat tentang Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok serta Menjamin Ketersediaan yang cukup dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang dihadiri oleh seluruh OPD terkait/Tim Pengendalian Inflasi Kab. Lampung Tengah.
3. Mengadakan persiapan Gerakan Penanaman Tanaman Pangan untuk mendukung Ketersediaan Pangan menghadapi kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan.
4. Memastikan kelancaran distribusi melalui perluasan pemasaran melalui platform digital melalui penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir yakni fasilitasi UMKM pangan binaan dengan e-commerce, melakukan inovasi sistem logistik, pembangunan sistem logistik daerah (Tugas TPID sesuai Keppres 23/2017) serta mendorong kemitraan industri dengan petani.
5. Melaksanakan Rakor Inflasi rutin setiap minggu bersama Kemendagri yang dihadiri oleh Seluruh OPD terkait/Tim Pengendalian Inflasi Kab. Lampung Tengah sesuai dengan undangan Kemendagri.
6. Melaksanakan Gerakan Tanam Jagung Serentak 1 Juta Hektar, penaburan bibit ikan nila dan memberikan bantuan bibit Jagung dan Padi kepada Petani dalam rangka mewujudkan Swasembada Pangan di Kabupaten Lampung Tengah.

7. Melakukan Pendataan dan Fasilitasi pedagang MINYAKKITA yang terdaftar di SP2KP untuk didaftarkan pada akun SIMIRAH di Pasar Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah.
8. Pemasangan Spanduk HET MINYAKKITA di 9 (Sembilan) Pasar Daerah se-Kabupaten Lampung Tengah.
9. Menyediakan *website* <https://simas-bapokting.lampungtenghkab.go.id/> guna menyebarluaskan informasi mengenai data inflasi, daftar harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat, serta menyediakan Mesin Running Text pada 9 Pasar Daerah agar masyarakat dapat dengan cepat melihat perkembangan harga bahan pokok dan sebagai upaya monitoring harga oleh pemerintah.
10. Meningkatkan komunikasi efektif dengan terus meningkatkan koordinasi, melakukan perluasan pemanfaatan PIHPS dan sistem harga lainnya sebagai landasan kebijakan TPID, serta melakukan peningkatan validitas dan kesinambungan data pangan dan pemantauan indikator terkini ekonomi daerah yang akurat dan terkini.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

IV. EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Lampung Tengah pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. TPID, BULOG dan Satgas Pangan perlu terus berkoordinasi dalam memastikan ketersediaan cadangan beras serta keterjangkauan harga komoditas di pasar khususnya sebelum memasuki musim panen raya
- b. Mengantisipasi disparitas harga termasuk komoditas hortikultura antara periode panen yang rendah dengan periode tanam yang tinggi
- c. Melakukan Koordinasi dan Komunikasi efektif dengan Satgas Pangan, POLRI, TPID, BUMN, Distributor dan Pengecer MINYAKKITA serta koordinasi dengan Dinas Perindustrian Provinsi Lampung dan Kementrian Perdagangan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

V. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Rekomendasi Kebijakan pengendalian Inflasi di Kabupaten Lampung Tengah pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memantau ketersediaan pasokan, keamanan dan kelayakan pangan di Kabupaten Lampung melalui TPID yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Daerah
2. Melakukan sidak ke distributor, agen, dan pengecer Gas Elpiji 3 Kg yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Daerah
3. Menyelenggarakan gerakan pangan murah, oprasi pasar dan bekerjasama dengan beberapa beberapa BUMN/D dan Pihak Swasta di seluruh Kabupaten di Lampung Tengah
4. Satgas Pangan mengawasi kelancaran dan keamanan distribusi komoditas pangan dan memastikan ketersediaan BBM dan elpiji dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui Sidak Satgas Pangan dengan melakukan sidak ke distributor, agen dan pengecer